



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2021/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NANTO DWI SUBEKTI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
3. NHK : 822853

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.040.890.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 625 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.950.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 286 m2/572 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 39089 m2/1000 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 490.890.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **593.411.458**

1. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. MOTOR, KTM DUKE SPORTY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 43.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY BEBEK Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
4. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA SUV Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
5. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA SUV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
6. MOBIL, TOYOTA DYNO 130 XT TOWING Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 73.455.729
7. MOBIL, TOYOTA DYNO 130 XT TRUCK TOWING Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 73.455.729

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **46.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	11.827.034.098
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	15.507.335.556
III. HUTANG	Rp.	3.278.612.133
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	12.228.723.423

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.